

Dampak Kehadiran Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Agraris: Studi Kasus di Desa Tinting Boyok, Kabupaten Sekadau

Vetronela Anggela

Agribisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak

E-mail: *vetronelaanggela38@gmail.com

ABSTRAK

Kehadiran perusahaan kelapa sawit telah memicu perubahan signifikan dalam struktur sosial masyarakat agraris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan PT Tinting Boyok Sawit Makmur (TBSM) terhadap perubahan sosial masyarakat agraris di Desa Tinting Boyok, Kabupaten Sekadau. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), serta penggunaan kuesioner terhadap 68 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan kelapa sawit telah mendorong pergeseran dalam pola pemilikan lahan dari pertanian subsisten ke perkebunan sawit, baik plasma maupun swadaya. Struktur pekerjaan masyarakat juga berubah dari petani tradisional menjadi buruh dan pekerja sektor jasa. Selain itu, terjadi peningkatan penggunaan input pertanian modern seperti pupuk kimia, pestisida, dan bibit unggul, meskipun masih terdapat kesenjangan akses pada petani kecil. Sementara itu, kelembagaan usahatani mengalami transformasi dengan munculnya kelompok tani dan pola kemitraan baru, namun juga menimbulkan ketimpangan relasi antara masyarakat dan perusahaan serta pergeseran nilai-nilai kolektif menjadi lebih individualistik. Perubahan ini mencerminkan transformasi dari sistem agraris tradisional ke arah masyarakat agraris modern berbasis industri. Namun demikian, transformasi ini juga memunculkan ketimpangan sosial dan tantangan keberlanjutan.

Kata kunci

Perubahan Sosisl, Masyarakat Agraris, Kelapa Sawit

ABSTRACT

The presence of oil palm companies has triggered significant changes in the social structure of agrarian communities. This study aims to analyze the impact of PT Tinting Boyok Sawit Makmur (TBSM) on social change within the agrarian society of Tinting Boyok Village, West Kalimantan. The research employed a descriptive method with both quantitative and qualitative approaches. Data were collected through observation, in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and questionnaires administered to 68 respondents selected using purposive sampling. The findings indicate that the presence of the oil palm company has led to a shift in land ownership patterns from subsistence farming to oil palm plantations, both in plasma and independent schemes. The community's occupational structure has also changed, with traditional farmers becoming laborers and workers in the service sector. Additionally, there has been an increase in the use of modern agricultural inputs such as chemical fertilizers, pesticides, and improved seeds, although access remains unequal for small-scale farmers. Meanwhile, agricultural institutions have undergone transformation with the emergence of farmer groups and new partnership models, but these have also created unequal relationships between the community and the company, along with a shift from collective values to more individualistic tendencies. These changes reflect a transition from a traditional agrarian system to a modern, industry-based agrarian society. However, this transformation also brings about social inequality and sustainability challenges.

Keywords

Social Change, Agrarian Society, Palm Oil

1. PENDAHULUAN

Industri dipandang sebagai salah satu ciri utama masyarakat modern karena menjadi pusat lahirnya dan berkembangnya inovasi teknologi. Kehadiran industri di tengah masyarakat tidak hanya menandai adanya modernisasi, tetapi juga berperan sebagai pendorong berlangsungnya proses perubahan sosial (Musyayyadah et al., 2023). Perkembangan teknologi telah memicu berdirinya pabrik-pabrik baru oleh para pengusaha sebagai sarana produksi, sehingga terbuka peluang kerja yang mampu menampung banyak tenaga kerja, salah satunya melalui perusahaan perkebunan kelapa sawit (Hidayah et al., 2020). Di Kalimantan Barat, dinamika perubahan sosial masyarakat perdesaan kerap dipicu oleh masuknya kekuatan eksternal berupa industri dan teknologi yang mengintervensi struktur agraris tradisional. Ekspansi industri perkebunan kelapa sawit menjadi faktor penting dalam proses transformasi tersebut karena tidak hanya mengubah pola produksi dan distribusi lahan, tetapi juga menggeser orientasi ekonomi rumah tangga dari pertanian subsisten berbasis pangan menuju sistem komersialisasi berbasis perkebunan. Dengan demikian, keberadaan industri perkebunan kelapa sawit tidak sekadar menghadirkan peluang ekonomi, melainkan juga membawa implikasi sosial yang mendalam terhadap struktur dan relasi sosial masyarakat setempat.

Keberadaan perusahaan kelapa sawit di berbagai wilayah perdesaan di Indonesia telah menyebabkan pergeseran pada tatanan sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Perusahaan tidak hanya membawa investasi dan infrastruktur, tetapi juga memicu konversi besar-besaran lahan pertanian rakyat ke dalam sistem ekonomi berbasis perkebunan. Hal ini berdampak pada perubahan struktur pekerjaan masyarakat, pola pemilikan lahan, adopsi teknologi pertanian modern, dan sistem kelembagaan lokal. Keberadaan perusahaan perkebunan tidak hanya membawa perubahan pada aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga berdampak besar terhadap struktur sosial masyarakat lokal.

Desa Tinting Boyok, yang terletak di Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, merupakan salah satu wilayah yang mengalami transformasi sosial signifikan sejak berdirinya perusahaan kelapa sawit PT Tinting Boyok Sawit Makmur (TBSM) pada tahun 2005. Keberadaan perkebunan kelapa sawit PT TBSM tentunya memiliki dampak terhadap perubahan sosial masyarakat sekitar. Sebagaimana dijelaskan oleh (Ardhi et al., 2023), pendirian sebuah perusahaan memiliki potensi memberikan dampak signifikan terhadap wilayah sekitarnya, baik pada tingkat mikro maupun makro. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada pengelolaan dan kebijakan yang diterapkan. Secara umum, keberadaan perusahaan di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi. Kehadiran perusahaan dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan akses dan peningkatan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Namun disisi lain juga akan memengaruhi terhadap kondisi ekosistem setempat baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Pengembangan perusahaan kelapa sawit dalam lingkungan masyarakat akan mendorong adanya ekspansi terhadap lahan hutan menjadi lahan industri perkebunan.

Salah satu dampak yang paling menonjol dari ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah pergeseran pemilikan lahan. Perusahaan seringkali memperoleh lahan dari masyarakat melalui berbagai mekanisme, seperti pembelian langsung, sewa, atau melalui skema kemitraan. Penelitian oleh Roanuddin (2016) menunjukkan bahwa di Desa Rintik, Kalimantan Timur, terjadi konflik terkait tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Meskipun konflik tersebut berhasil diselesaikan melalui

musyawarah, hal ini menunjukkan adanya potensi permasalahan dalam distribusi dan pemilikan lahan akibat ekspansi Perkebunan. Kehadiran perusahaan kelapa sawit juga mempengaruhi adopsi input usahatani oleh petani lokal. Pengenalan teknologi baru, akses terhadap pupuk dan bibit unggul, serta penerapan praktik pertanian modern mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Namun, tingkat adopsi ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk kesiapan petani dalam menerima inovasi serta dukungan yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah setempat. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021), industri kelapa sawit di Indonesia dibangun dengan pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, kehadiran perkebunan kelapa sawit telah mendorong terbukanya masyarakat terhadap etnis dan kelompok pendatang dari luar daerah. Kehadiran pekerja migran yang bekerja di perusahaan perkebunan turut memengaruhi nilai-nilai serta tradisi lokal. Masyarakat setempat dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan adat istiadat mereka di tengah pengaruh modernisasi dan intensifikasi interaksi dengan budaya asing. Masuknya perusahaan kelapa sawit juga membawa perubahan dalam struktur pekerjaan masyarakat desa. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pertanian subsisten atau perkebunan kecil kini beralih menjadi pekerja di perusahaan kelapa sawit. Hal ini berdampak pada pola penghidupan, sistem upah, dan tingkat kesejahteraan. Studi kasus di Kabupaten Rokan Hulu oleh Siradjuddin (2015) menemukan bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja dan peluang usaha baru. Kelembagaan usahatani pun mengalami pergeseran, dari sistem gotong royong yang bersifat komunal menuju kelembagaan baru berbasis kelompok tani binaan perusahaan dan skema kemitraan formal yang sering kali memunculkan relasi yang timpang antara perusahaan dan masyarakat, serta pergeseran nilai kolektif menjadi lebih individualistis.

Sehubungan dengan uraian diatas, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit PT TBSM terhadap perubahan sosial masyarakat agraris di Desa Tinting Boyok. Secara lebih rinci, penelitian ini diarahkan untuk memahami pergeseran pola pemilikan lahan, transformasi struktur pekerjaan masyarakat, tingkat adopsi input pertanian modern, serta perubahan kelembagaan usahatani yang terjadi sebagai akibat dari integrasi masyarakat ke dalam sistem perkebunan industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit terhadap perubahan sosial masyarakat agraris di Desa Tinting Boyok. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi studi sosiologi perdesaan, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode campuran (*mixed methods*), yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak kehadiran perusahaan kelapa sawit terhadap perubahan sosial masyarakat agraris. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan data numerik dan naratif dalam menjelaskan fenomena sosial yang kompleks di tingkat lokal. Secara kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi objektif melalui data statistik

seperti distribusi pemilikan lahan, struktur pekerjaan, serta penggunaan input pertanian modern. Pendekatan ini digunakan untuk menyajikan frekuensi, persentase, dan distribusi variabel utama yang dikaji. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna di balik perubahan sosial yang terjadi, melalui penggalian informasi mendalam dari para pelaku masyarakat, sehingga mampu menangkap dinamika, persepsi, dan interpretasi sosial atas dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit.

Dalam penelitian ini, populasi merujuk pada masyarakat Desa Tinting Boyok, Kabupaten Sekadau, yang mengalami dampak dari kehadiran perusahaan kelapa sawit PT Tinting Boyok Sawit Makmur (PT TBSM), baik secara langsung maupun tidak langsung. Populasi ini dianggap relevan karena mereka memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu perubahan sosial masyarakat agraris akibat aktivitas industri kelapa sawit. Namun, karena jumlah populasi tersebut tidak diketahui secara pasti maka penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Lemeshow (1997), yang umum digunakan dalam kondisi populasi tak terdefinisi secara pasti. Dengan tingkat kepercayaan 90% dan margin of error 10%, perhitungan melalui rumus tersebut menghasilkan jumlah sampel sebesar 68 responden. Untuk memperoleh sampel yang representatif, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria ini mencakup keterlibatan atau pengalaman langsung maupun tidak langsung masyarakat dengan perusahaan. Tujuan dari pemilihan ini adalah untuk menjangkau berbagai latar belakang dan pengalaman masyarakat, sehingga data yang diperoleh mencerminkan keragaman dampak secara menyeluruh.

Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan kuesioner terstruktur. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Wawancara mendalam ditujukan kepada informan kunci untuk menggali informasi kualitatif yang mendalam, sedangkan FGD digunakan untuk menangkap opini kolektif dan dinamika kelompok. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator dari empat variabel utama yang dikaji, yaitu pemilikan lahan, struktur pekerjaan, adopsi input usahatani, dan kelembagaan usahatani. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti profil desa, laporan CSR perusahaan, data kependudukan, serta literatur yang relevan.

Instrumen penelitian berupa kuesioner dikembangkan berdasarkan indikator operasional dari setiap variabel. Variabel pemilikan lahan mencakup distribusi lahan berdasarkan komoditas (sawit plasma, sawit swadaya, karet, padi, dan hortikultura). Variabel struktur pekerjaan mencakup jenis mata pencaharian utama dan tambahan, peran gender dalam pekerjaan, serta status kerja. Variabel adopsi input usahatani mencakup penggunaan pupuk, pestisida, dan bibit unggul. Sedangkan variabel kelembagaan usahatani mencakup partisipasi dalam kelompok tani, bentuk kemitraan, serta keberlanjutan kelembagaan sosial dan tradisional.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang dilakukan secara terpadu melalui metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menggambarkan data secara numerik dan sistematis, melalui teknik statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi, persentase, dan tabulasi sederhana. Menurut Sugiyono, (2022), statistik deskriptif merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Data kuantitatif tersebut disajikan dalam bentuk tabel satu arah yang menunjukkan frekuensi

atau jumlah dari satu jenis informasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Yuliani (2019), tabulasi sederhana digunakan untuk memudahkan penyajian dan pemahaman hasil penelitian, terutama dalam menjelaskan distribusi data berdasarkan satu variabel tertentu.

Penyusunan tabulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dasar yang jelas sebelum dilakukan analisis lebih lanjut dalam bentuk grafik atau interpretasi naratif. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami makna di balik fenomena sosial yang muncul, khususnya yang tidak dapat dijelaskan secara numerik. Analisis kualitatif dilakukan secara naratif dan tematik dengan merujuk pada tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Proses ini melibatkan pengelompokan data berdasarkan tema tertentu, diikuti dengan interpretasi logis atas hasil wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan makna di balik perubahan sosial yang terjadi dan menjelaskan bagaimana masyarakat merespons dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit dalam kehidupan mereka sehari-hari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini memberikan gambaran sosial-demografis masyarakat agraris Desa Tinting Boyok sebagai bagian dari dinamika perubahan sosial akibat kehadiran perusahaan kelapa sawit PT TBSM. Sebanyak 69 responden terlibat dalam penelitian ini, yang dipilih untuk mewakili keberagaman masyarakat desa berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota keluarga. Selain itu, 8 responden juga dilibatkan dalam kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk memperdalam temuan kualitatif penelitian. Tabel 1 berikut menyajikan data karakteristik masyarakat agraris di Desa Tinting Boyok.

Tabel 1. Data Responden

Karakteristik	Kategori	Hasil Deskriptif	Persentase (%)
Jumlah Sampel		69	
Usia	20 - 30 Tahun	15	21.74
	31 - 40 Tahun	29	42.03
	41 - 50 Tahun	17	24.64
	51 - 60 Tahun	7	10.14
	61 - 70 Tahun	1	1.45
Jenis Kelamin	Laki-Laki	55	79.71
	Perempuan	14	20.29
Pendidikan	SD	29	42,03
	SMP/ SLTP	10	14,49
	SMA / SLTA	17	24,64
	D3	2	2,90
	S1	11	15,94
Jumlah Anggota Keluarga	1 - 5 Orang	65	94.20
	6 - 10 Orang	4	5.80

Mayoritas responden berada pada usia produktif, yang menunjukkan kapasitas fisik dan sosial yang relatif tinggi dalam beradaptasi terhadap perubahan ekonomi yang terjadi di desa. Dominasi responden laki-laki mencerminkan struktur masyarakat agraris tradisional, di mana laki-laki berperan sebagai pengambil keputusan dan tenaga kerja utama dalam sektor pertanian. Namun demikian, keterlibatan perempuan, baik dalam kegiatan pertanian maupun sebagai tenaga kerja di perusahaan kelapa sawit, menandai adanya pergeseran peran gender serta meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan di pedesaan.

Dari sisi pendidikan, sebagian besar responden hanya menamatkan pendidikan dasar, sementara sebagian kecil lainnya telah mencapai pendidikan menengah dan tinggi. Pola ini menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan antargenerasi, sekaligus munculnya kelompok masyarakat dengan kapasitas pengetahuan yang lebih tinggi, yang berpotensi mempercepat proses adaptasi terhadap modernisasi pertanian dan perubahan sosial.

Struktur keluarga yang relatif kecil mencerminkan pergeseran dari keluarga besar (*extended family*) menuju keluarga inti (*nuclear family*). Kondisi ini berdampak pada berkurangnya tenaga kerja dalam usahatani serta menimbulkan tantangan dalam regenerasi petani muda, terutama di tengah meningkatnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor non-pertanian.

3.2 Dampak Perusahaan Kelapa Sawit terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Agraris

Kehadiran PT Tinting Boyok Sawit Makmur (TBSM) di Desa Tinting Boyok telah menjadi pemicu utama transformasi sosial masyarakat agraris. Perubahan tidak hanya tampak dalam pergeseran aktivitas ekonomi dari pertanian subsisten menuju perkebunan kelapa sawit, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih luas seperti pola pikir, gaya hidup, dan sistem kelembagaan lokal. Adaptasi masyarakat terhadap sistem ekonomi modern menandai pergeseran dari struktur sosial agraris tradisional ke arah tatanan masyarakat yang semakin terbuka terhadap logika pasar dan kapitalisasi sumber daya alam. Untuk memahami dinamika perubahan ini secara menyeluruh, pembahasan diarahkan pada empat aspek utama yang menjadi indikator penting transformasi sosial, yaitu: pemilikan lahan, struktur pekerjaan, adopsi input usahatani, dan kelembagaan usahatani.

a. Perubahan Pemilikan Lahan

Masuknya perusahaan kelapa sawit ke Desa Tinting Boyok telah mendorong perubahan orientasi pengelolaan lahan dari subsisten ke arah komersial. Jika sebelumnya lahan digunakan untuk menanam padi, karet, dan sayuran sebagai sumber pangan dan penghidupan sehari-hari, kini sebagian besar telah dikonversi menjadi kebun kelapa sawit, baik melalui skema plasma maupun swadaya. Pergeseran ini tidak hanya mengubah sistem produksi, tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan, relasi sosial, dan struktur ekonomi lokal. Lahan yang dahulu menjadi simbol keberlanjutan subsistensi kini dimaknai sebagai aset produktif dalam sistem pasar, yang mencerminkan transformasi nilai dan cara pandang masyarakat terhadap sumber daya agraria.

Table 2. Distribusi Pemilikan Lahan Kebun Kelapa Sawit Plasma

Golongan Luas Pemilikan Lahan (Ha)	Jumlah Pemilik		Luas Pemilikan (Ha)	
	Absolut	Persentase	Absolut	Persentase
0	35	50.72	0	0
0,01 – 1,00	17	24.64	13.96	18.65
1,01 – 2,00	7	10.14	14	18.70

2,01 – 3,00	3	4.35	8.3	11.09
> 3,01	7	10.14	38.61	51.57
Jumlah	69	100	74.87	100

Distribusi kepemilikan lahan plasma di Desa Tinting Boyok menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan. Data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga (50,72%) sama sekali tidak memiliki lahan plasma. Sebaliknya, hanya sekitar 10,14% rumah tangga yang menguasai lahan lebih dari 3 hektar, namun kelompok kecil ini justru menguasai lebih dari separuh total luas lahan plasma (51,57%). Kondisi tersebut menggambarkan adanya kecenderungan akumulasi lahan pada sebagian kecil rumah tangga. Kondisi ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga terkait dengan akses informasi, keterlibatan awal dalam program plasma, serta peran tokoh desa dalam negosiasi awal dengan perusahaan. Rumah tangga yang lebih dahulu terlibat dalam kemitraan biasanya memperoleh jatah lahan yang lebih luas, baik karena letak lahannya yang strategis maupun kemampuan administratif untuk memenuhi persyaratan awal program.

Studi sebelumnya menyatakan bahwa kelapa sawit memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia, namun juga menimbulkan masalah sosial akibat sengketa agraria dan lingkungan. Konflik antara masyarakat dan perusahaan sering muncul karena kurangnya transparansi, ketidaktersediaan informasi yang memadai, serta distribusi manfaat yang tidak seimbang (Grasse, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa model penguasaan lahan yang tidak inklusif dapat menimbulkan dampak struktural dan sosial yang serius.

Di sisi lain, masyarakat yang belum terlibat dalam program plasma cenderung memilih mengelola lahannya secara swadaya karena dianggap lebih fleksibel dan memberikan keuntungan langsung. Dengan demikian, ketidakmerataan kepemilikan lahan plasma mendorong masyarakat untuk beralih ke pola pengelolaan sawit swadaya, yang memungkinkan kontrol penuh terhadap lahan. Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa skema plasma belum sepenuhnya inklusif dan berpotensi memperdalam kesenjangan sosial-ekonomi di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kemitraan yang lebih adil, transparan, dan inklusif agar manfaat ekonomi dari sektor kelapa sawit dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 3. Distribusi Pemilikan Lahan Kebun Kelapa Sawit Swadaya

Golongan Luas Pemilikan Lahan (Ha)	Jumlah Pemilik		Luas Pemilikan (Ha)	
	Absolut	Persentase	Absolut	Persentase
0	0	0	0	0
0,01 – 1,00	1	1.45	1	0.29
1,01 – 2,00	7	10.14	14	3.99
2,01 – 3,00	16	23.19	46.8	13.34
> 3,01	45	65.22	289	82.38
Jumlah	69	100	350.8	100

Distribusi pemilikan lahan kebun kelapa sawit swadaya di Desa Tinting Boyok memperlihatkan gambaran kontras tentang relasi kekuasaan dan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya agraria. Meskipun model swadaya secara konseptual menawarkan kebebasan dan kemandirian dalam pengelolaan lahan berbeda dengan skema plasma yang sarat kontrol perusahaan fakta di lapangan justru menunjukkan konsentrasi lahan pada kelompok rumah tangga tertentu. Data menunjukkan bahwa lebih dari 65% responden menguasai lahan di atas 3 hektar dan mendominasi lebih dari 80%

total luas kebun swadaya. Sebaliknya, kelompok petani kecil yang memiliki kurang dari 2 hektar hanya menguasai sebagian kecil dari total lahan, dan tidak ada satu pun responden yang tidak memiliki lahan sama sekali, yang menandakan bahwa model ini sangat diminati namun tidak sepenuhnya inklusif.

Dampak sosial dari pola pemilikan lahan yang timpang sangat terlihat pada melemahnya kohesi sosial. Relasi yang terbentuk lebih banyak bersifat hubungan kerja, di mana pemilik lahan berperan sebagai pemberi kerja dan tetangganya sebagai buruh panen, sehingga secara perlahan mengikis nilai-nilai kesetaraan dalam komunitas. Fenomena ini menunjukkan pergeseran dari masyarakat kolektif berbasis solidaritas menuju masyarakat agraris yang lebih individualistik dan berorientasi pada kepentingan ekonomi semata. Sebagaimana dijelaskan oleh Woolcock dan Narayan (2020), modal sosial memiliki peran krusial dalam memperkuat kohesi masyarakat. Namun, dalam konteks distribusi lahan sawit swadaya yang sangat timpang, jaringan sosial yang terbentuk justru mencerminkan eksklusi dan fragmentasi. Ketimpangan tersebut berpotensi menimbulkan konflik laten akibat kecemburuan sosial, terutama karena keuntungan dari hasil sawit, akses pasar, dan ekspansi usaha lebih mudah dinikmati oleh pemilik modal besar. Kondisi ini sejalan dengan temuan internasional yang menegaskan bahwa keterbatasan akses terhadap lahan merupakan salah satu faktor utama yang membuat masyarakat pedesaan terjebak dalam kemiskinan. Konsentrasi penguasaan lahan pada segelintir pihak membatasi kesempatan produksi masyarakat secara luas, sehingga akumulasi keuntungan hanya beredar di lingkaran kecil, sementara mayoritas warga kehilangan peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sebaliknya, distribusi lahan yang lebih merata terbukti dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat yang lebih inklusif (Anseeuw & Baldinelli, 2020). Dampak sosial dari pola pemilikan yang timpang ini sangat terasa pada melemahnya kohesi sosial. Relasi sosial yang terbentuk lebih banyak didasarkan pada hubungan kerja seperti pemilik lahan sebagai pemberi kerja dan tetangganya sebagai buruh panen yang secara perlahan mengikis nilai-nilai kesetaraan dalam komunitas.

Fenomena ini memperlihatkan pergeseran dari masyarakat kolektif berbasis solidaritas ke arah masyarakat agraris individual yang berorientasi pada kepentingan ekonomi semata. Sebagaimana dijelaskan oleh, modal sosial memiliki peran penting dalam memperkuat kohesi masyarakat. Namun dalam konteks distribusi lahan sawit swadaya yang sangat timpang, jaringan sosial yang terbentuk justru mencerminkan eksklusi dan fragmentasi. Ketimpangan ini bahkan dapat melahirkan potensi konflik laten akibat kecemburuan sosial, terutama karena keuntungan dari hasil sawit, akses pasar, dan ekspansi usaha lebih mudah dinikmati oleh pemilik modal besar.

Dengan demikian, meskipun kebun sawit swadaya menjadi simbol kemandirian ekonomi masyarakat desa, namun tanpa intervensi kebijakan yang menjamin distribusi akses yang adil, penguatan kelembagaan kolektif, serta fasilitasi akses permodalan bagi petani kecil, model ini justru dapat melanggengkan ketimpangan struktural baru. Transformasi agraria yang terjadi di Desa Tinting Boyok bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi mencerminkan perubahan yang lebih dalam dalam sistem relasi sosial, nilai-nilai kolektif, dan arah pembangunan perdesaan yang berbasis komoditas.

Tabel 4. Distribusi Pemilikan Lahan Kebun Karet

Golongan Luas Pemilikan Lahan (Ha)	Jumlah Pemilik		Luas Pemilikan (Ha)	
	Absolut	Persentase	Absolut	Persentase
0	51	73.91	0	0
0,01 – 1,00	9	13.04	7.3	24.91
1,01 – 2,00	6	8.70	10	34.13

2,01 – 3,00	1	1.45	3	10.24
> 3,01	2	2.90	9	30.72
Jumlah	69	100	29.3	100

Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Desa Tinting Boyok (73,91%) tidak lagi memiliki kebun karet. Hal ini mengindikasikan bahwa tanaman karet telah kehilangan peran strategisnya dalam struktur agraria lokal dan digantikan oleh komoditas kelapa sawit yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Perubahan ini mencerminkan pergeseran orientasi ekonomi masyarakat dari komoditas tradisional menuju tanaman komersial bernilai tinggi, seiring dengan pengaruh harga pasar global dan rendahnya produktivitas karet. Sejalan dengan temuan (Risamarini et al., 2024),

Dari sisi sosial, hilangnya peran strategis kebun karet juga berdampak pada melemahnya pola kerja kolektif dan nilai gotong royong. Praktik bertani karet sebelumnya dilakukan secara bersama-sama dalam penyadapan, pengumpulan lateks, hingga pengangkutan, yang memperkuat solidaritas sosial. Namun kini, dengan peralihan ke sawit yang lebih individualistik, pola relasi antarpetani menjadi lebih terfragmentasi dan berbasis kepentingan ekonomi. Masyarakat yang dulunya saling bergantung kini lebih fokus pada usaha masing-masing, sehingga secara perlahan kohesi sosial desa terkikis. Proses perubahan ini menunjukkan kemampuan petani kontemporer untuk menyesuaikan strategi produksi terhadap tekanan pasar, meski sering kali harus mengorbankan nilai-nilai budaya dan sosial yang telah lama melekat dalam komunitas agraris (Sari & Putra, 2023).

Dengan demikian, berkurangnya pemilikan kebun karet di Desa Tinting Boyok bukan hanya mencerminkan perubahan komoditas, tetapi juga mengindikasikan transformasi nilai, identitas agraris, dan sistem kerja kolektif masyarakat. Proses ini sejalan dengan apa yang disebut sebagai bentuk adaptasi petani kontemporer, yakni kemampuan petani dalam mengalihkan strategi produksi demi merespons tekanan pasar global, meski harus mengorbankan nilai-nilai budaya dan sosial yang telah lama melekat dalam komunitas agraris.

Tabel 5. Distribusi Pemilikan Lahan Tanaman Padi

Golongan Luas Pemilikan Lahan (Ha)	Jumlah Pemilik		Luas Pemilikan (Ha)	
	Absolut	Persentase	Absolut	Persentase
0	26	37.68	0	0
0,01 – 1,00	25	36.23	21.25	37.64
1,01 – 2,00	17	24.64	30.2	53.50
2,01 – 3,00	0	0	0	0
> 3,01	1	1.45	5	8.86
Jumlah	69	100	56.45	100

Distribusi pemilikan lahan padi di Desa Tinting Boyok menunjukkan pola yang relatif lebih merata dibandingkan dengan lahan kelapa sawit dan karet, meskipun tetap memunculkan dinamika agraria yang mencerminkan tekanan modernisasi ekonomi desa. Berdasarkan Tabel 5, sekitar 60,87% rumah tangga memiliki lahan padi dengan luas kurang dari 2 hektar, sementara 37,68% rumah tangga sama sekali tidak memiliki lahan padi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun padi masih menjadi komoditas utama subsisten, terdapat lapisan masyarakat yang kehilangan akses terhadap sumber pangan mandiri.

Lahan padi tetap berperan sebagai simbol keberlanjutan sistem agraris tradisional yang berbasis pada kebutuhan pangan dan relasi sosial berbentuk gotong royong. Praktik pertanian padi selama ini menjadi ruang sosial penting yang mempererat kerja kolektif warga, terutama pada masa tanam dan panen. Namun, dengan menyusutnya luas lahan dan menurunnya partisipasi generasi muda, nilai-nilai sosial tersebut mulai memudar, mengarah pada krisis regenerasi dan melemahnya kohesi sosial antarpetani. Secara bertahap, sistem agraria berbasis pangan mulai tergeser oleh orientasi terhadap tanaman komersial seperti kelapa sawit. Alih fungsi lahan padi menjadi komoditas non-pangan, khususnya kelapa sawit, semakin mengancam ketahanan pangan lokal. Sunartomo (2015), menekankan bahwa alih fungsi lahan merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan karena mengurangi luas lahan pertanian padi yang tersedia. Meskipun ketimpangan pemilikan lahan padi tidak sebesar pada komoditas sawit, keberadaan lebih dari sepertiga rumah tangga tanpa lahan tetap menunjukkan potensi kerentanan terhadap ketahanan pangan lokal, terutama ketika akses terhadap pasar atau bantuan pemerintah terbatas. Selain itu, tekanan dari ekspansi kelapa sawit semakin menempatkan komoditas pangan ini dalam posisi terdesak, mendorong sebagian petani untuk mempertimbangkan pengalihfungsian lahan demi keuntungan ekonomi jangka pendek, meski hal ini berpotensi mengorbankan keberlanjutan jangka panjang.

Dengan demikian, meskipun lahan padi masih berfungsi sebagai penyangga ketahanan pangan dan warisan nilai sosial tradisional, penyusutan luas lahan dan meningkatnya ketimpangan menjadi indikator penting perubahan sosial dan ekonomi yang tengah berlangsung di tingkat desa. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara upaya mempertahankan nilai-nilai lama dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi baru yang dipengaruhi oleh tekanan pasar.

Tabel 6. Distribusi Pemilikan Lahan Hortikultura

Golongan Luas Pemilikan Lahan (Ha)	Jumlah Pemilik		Luas Pemilikan (Ha)	
	Absolut	Persentase	Absolut	Persentase
0	62	89.86	0	0
0,01 – 1,00	6	8.70	3.1	75.61
1,01 – 2,00	1	1.45	1	24.39
2,01 – 3,00	0	0	0	0
> 3,01	0	0	0	0
Jumlah	69	100	4.1	100

Distribusi pemilikan lahan hortikultura di Desa Tinting Boyok sangat timpang, dengan hampir 90% rumah tangga tidak memiliki lahan hortikultura dan hanya segelintir yang mengusahakannya dalam skala sangat kecil (total 4,1 hektar). Data ini menunjukkan bahwa hortikultura berada dalam posisi marjinal dalam struktur pertanian lokal, kalah bersaing dengan komoditas utama seperti kelapa sawit dan padi. Minimnya minat terhadap hortikultura dipengaruhi oleh tingginya biaya produksi, keterbatasan akses pasar, dan tidak adanya kelembagaan pendukung, sehingga kegiatan ini dilakukan secara individual tanpa dukungan sosial-komunal (Nurhadi et al., 2019; Putri & Santoso, 2021). Akibatnya, petani hortikultura kurang terwakili dalam struktur sosial desa dan tidak terlibat dalam proses pembangunan pertanian secara kolektif. Tidak berkembangnya sistem kerja gotong royong dalam hortikultura turut memperlemah ikatan sosial dan memperbesar isolasi antarpetani. Meskipun demikian, penguasaan signifikan oleh segelintir pelaku menunjukkan adanya potensi ekonomi tersembunyi, yang dapat dimaksimalkan melalui intervensi teknis dan kelembagaan (Arifin et al., 2020). Dengan

kata lain, sektor hortikultura dapat menjadi alternatif ekonomi, tetapi saat ini masih terpinggirkan oleh logika kapitalisasi lahan dan dominasi komoditas komersial.

Di sisi lain, homogenisasi sistem produksi melalui dominasi sawit menyebabkan ketergantungan tinggi pada satu komoditas, yang berisiko menimbulkan ketimpangan dan menggerus nilai-nilai sosial seperti solidaritas dan kerja bersama. Sebagaimana ditunjukkan oleh data dan perubahan perilaku masyarakat, kehadiran PT TBSM telah mendorong restrukturisasi menyeluruh dalam relasi agraria, pola penghidupan, serta sistem sosial desa. Oleh karena itu, transformasi ini perlu mendapat perhatian serius dalam kebijakan pembangunan perdesaan, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial, keberagaman produksi, dan kohesi masyarakat lokal.

b. Perubahan Struktur Pekerjaan

Kehadiran perusahaan kelapa sawit PT Tinting Boyok Sawit Makmur (TBSM) telah membawa dampak signifikan terhadap struktur pekerjaan masyarakat di Desa Tinting Boyok. Sebelum perusahaan hadir, mata pencaharian utama masyarakat umumnya bersumber dari sektor pertanian tradisional seperti bertani padi dan berkebun karet. Aktivitas ini dilakukan secara subsisten dan bersifat musiman, dengan tingkat ketergantungan tinggi pada alam serta pola kerja keluarga yang kolektif. Namun, kehadiran perusahaan kelapa sawit telah mendorong perubahan signifikan, di mana banyak masyarakat kini bekerja sebagai buruh perkebunan atau karyawan perusahaan sebagai sumber penghasilan utama.

Menariknya, kegiatan bertani yang dulunya merupakan pekerjaan pokok, kini mulai bergeser menjadi pekerjaan sampingan. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan masyarakat dalam pekerjaan formal di perusahaan serta perubahan orientasi terhadap sistem pertanian yang lebih komersial. Berdasarkan data pemilikan lahan, hampir seluruh masyarakat di Desa Tinting Boyok saat ini memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang mereka kelola secara mandiri. Aktivitas sebagai pengelola kebun kelapa sawit ini menjadi bentuk pekerjaan sampingan yang umum dilakukan oleh masyarakat, yang dalam hal ini disebut sebagai perkebun. Berikut data Jenis Aktivitas Kerja Masyarakat:

Tabel 7. Struktur Pekerjaan Rumah Tangga Sampel Menurut Jenis Aktivitas dan Prioritas Pekerjaan di Desa Tinting Boyok

Jenis Aktivitas Kerja	Prioritas Pekerjaan			
	Pokok		Sampingan	
	Rumah Tangga	Persentase	Rumah Tangga	Persentase
BHT Perusahaan	23	33.33	0	0
BHL Perusahaan	11	15.94	1	1.45
Pedagang besar	2	2.90	3	4.35
Pedagang kecil	0	0	5	7.25
Pegawai negeri	4	5.80	0	0
Pemanen sawit	1	1.45	7	10.14
Perangkat desa	4	5.80	0	0
Petani	18	26.09	8	11.59
Pekebun	0	0	19	27.54
Supir angkutan buah kelapa sawit	6	8.70	0	0
Tidak punya aktivitas	0	0	26	37.68
Jumlah	69	100	69	100

Keterangan : BHT = Buruh Harian Tetap; BHL = Buruh Harian Lepas

Berdasarkan data dalam Tabel 7, sekitar 59,42% rumah tangga responden kini memiliki pekerjaan utama yang tergolong sebagai pekerjaan baru yang muncul seiring dengan kehadiran perusahaan. Jenis pekerjaan ini mencakup Buruh Harian Tetap (33,33%), Buruh Harian Lepas (15,94%), pemanen sawit (1,45%), dan sopir angkutan buah kelapa sawit (8,7%). Sementara itu, sekitar 40,58% rumah tangga lainnya masih bertahan pada pekerjaan lama, seperti petani (26,09%), pegawai negeri (5,80%), perangkat desa (5,80%), dan pedagang besar (2,90%). Meskipun pekerjaan lama masih dijalankan oleh sebagian masyarakat, pergeseran dominasi sangat jelas. Pertanian, yang dulunya menjadi pekerjaan utama, kini lebih sering dilakukan sebagai pekerjaan sampingan. Sebaliknya, pekerjaan-pekerjaan formal di sektor perkebunan kini menjadi pilihan utama, terutama bagi kelompok usia muda yang lebih memilih pendapatan rutin dan stabil dibandingkan hasil pertanian yang tidak menentu. Perubahan ini mencerminkan apa yang oleh Giddens dalam Sari (2023) sebut sebagai *pergeseran nilai rural-urban*, yaitu perubahan cara pandang masyarakat dari nilai kerja tradisional menuju rasionalitas ekonomi yang berorientasi pasar.

Pergeseran ini juga mengubah lanskap sosial di desa. Pola kerja komunal dan nilai gotong royong yang sebelumnya menjadi landasan kehidupan agraris mulai ditinggalkan, bergeser ke arah struktur kerja yang lebih individualistik. Menurut Faqih & Khairussalam (2024), meskipun pekerjaan baru dalam sektor perkebunan memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat desa, praktik gotong royong sebagai modal sosial semakin berkurang karena masyarakat lebih berorientasi pada kepentingan pragmatis individual dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal juga meningkat, menunjukkan adanya perubahan peran gender dalam rumah tangga. Namun, tidak semua masyarakat berhasil beradaptasi dengan struktur kerja baru ini. Sekitar 37,68% rumah tangga tercatat tidak memiliki pekerjaan sampingan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh tuntutan kerja utama yang padat, keterbatasan lahan, atau kurangnya akses terhadap peluang ekonomi lain di luar perusahaan.

Transformasi yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, melainkan juga memengaruhi dimensi sosial dan budaya. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan adat, kerja bakti, maupun sistem pertanian kolektif mengalami penurunan. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, solidaritas, dan kerja bersama mulai memudar, digantikan oleh pola interaksi yang lebih pragmatis serta berbasis kontrak. Dengan demikian, perubahan struktur pekerjaan di Desa Tinting Boyok tidak hanya mencerminkan transformasi ekonomi akibat kehadiran perusahaan, tetapi juga menandai pergeseran mendalam dalam sistem sosial, peran keluarga, dan nilai-nilai kultural masyarakat desa. Perubahan ini bersifat ambivalen: di satu sisi membawa peningkatan kesejahteraan, tetapi di sisi lain juga memunculkan tantangan sosial baru yang perlu dikelola secara bijak dalam kebijakan pembangunan berbasis komunitas.

c. Pergeseran Adopsi Input Usahatani dan Maknanya

Transformasi penggunaan input usahatani modern di Desa Tinting Boyok memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar perubahan teknis dalam praktik bertani. Sebelum hadirnya perusahaan kelapa sawit, pola pertanian masyarakat masih berlandaskan pada kearifan lokal dengan input yang sangat terbatas, misalnya pemanfaatan bibit lokal, pemupukan alami, serta minimnya penggunaan pestisida. Pola ini mencerminkan sistem pertanian subsisten yang bertumpu pada pengalaman turun-temurun, solidaritas sosial, dan ketergantungan terhadap siklus alam.

Namun, sejak kehadiran PT Tinting Boyok Sawit Makmur (TBSM), masyarakat mengalami pergeseran paradigma menuju pertanian yang lebih modern, komersial, dan berbasis logika pasar. Adopsi pupuk kimia, pestisida, dan bibit unggul menandai

pergeseran dari pertanian subsisten ke pertanian intensif dengan orientasi produktivitas. Transformasi ini terutama terjadi pada kelompok petani dengan luas lahan yang lebih besar, sebagaimana tergambar dalam Tabel 7 dan Tabel 8. Data menunjukkan bahwa semakin besar luas lahan, semakin tinggi intensitas penggunaan pupuk, pestisida, dan bibit unggul. Misalnya, petani dengan lahan 10–15 hektar menggunakan hingga 3.224 kg NPK per hektar dan 63 liter pestisida, jauh melebihi kelompok petani kecil. Demikian pula dalam penggunaan bibit unggul, kelompok skala besar mengakses varietas seperti Marihat dan Yangambi dalam jumlah lebih besar, yang menunjukkan adanya orientasi kuat pada efisiensi dan produktivitas. Petani skala besar cenderung lebih adaptif terhadap teknologi baru karena memiliki modal, jaringan, dan sumber daya yang memadai. Sebaliknya, petani kecil masih menghadapi keterbatasan serius, bukan hanya dalam aspek permodalan, tetapi juga dalam hal pengetahuan dan akses informasi.

Tabel 8. Rata-Rata Penggunaan Pupuk Modern dan Pestisida Menurut Golongan Luas Kebun Kelapa Sawit Swadaya

Golongan Luas Penguasaan (Ha)	Penggunaan Pupuk Rata-Rata Per Hektar				Penggunaan Pestisida Rata-Rata Per Hektar
	NPK (kg)	Urea (kg)	KCL (kg)	Dolomit (Kg)	(Liter/Ha)
1,00 – 5,00	967.88	658.21	426	719.16	7.3
5,01 – 10,00	1811.53	1385	818.57	877.71	19
10,01 – 15,00	3224	2496	1125	3076.66	63
Jumlah	6003.41	4539.21	2369.57	4673.53	89.3

Tabel 9. Rata-Rata Penggunaan Bibit Unggul Menurut Golongan Luas Kebun Kelapa Sawit Swadaya

Golongan Luas Penguasaan (Ha)	PPKS Parindu (Per Batang)	Marihat (Per Batang)	Socfindo (Per Batang)	Sriwijaya (Per Batang)	Yangambi (Per Batang)
1,00 – 5,00	318.5	396.5	455.71	254.09	307.66
5,01 – 10,00	572	409	495.6	281.33	519.4
10,01 – 15,00	866.66	1560	1040	650	650
Jumlah	1757.16	2365.5	1991.31	1185.42	1477.06

Fenomena adopsi input pertanian modern di Desa Tinting Boyok memperlihatkan bahwa modernisasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sangat terkait dengan kapasitas ekonomi, pengetahuan, serta jaringan produksi yang dimiliki petani. Keterbatasan pengetahuan membuat sebagian petani kecil kesulitan memahami dosis, efektivitas, maupun tata cara penggunaan pupuk dan pestisida dengan tepat. Akibatnya, mereka cenderung bergantung pada pengalaman tradisional atau meniru praktik petani lain tanpa memahami secara mendalam prinsip-prinsip penggunaannya. Hambatan akses semakin memperburuk kondisi ini, sebab distribusi informasi, pelatihan, maupun pendampingan penyuluhan biasanya lebih mudah dijangkau oleh petani yang memiliki jaringan produksi luas atau tinggal dekat dengan pusat pelayanan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Adam et al., 2021) yang menunjukkan bahwa usia dan pengalaman pelatihan memengaruhi tingkat adopsi teknologi pertanian, di mana petani yang berusia lebih tua relatif lambat dalam menerima inovasi. Sejalan dengan temuan tersebut, (Akzar et al., 2023) menegaskan bahwa rendahnya pendidikan, terbatasnya akses informasi, serta jarak geografis dari pusat penyuluhan merupakan faktor yang menurunkan peluang petani kecil untuk mengadopsi input modern. Dalam

konteks ini, perbedaan kapasitas antarpetani menjadi semakin terlihat. Petani skala besar yang memiliki sumber daya lebih memadai cenderung mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru, sementara petani kecil justru berisiko tertinggal karena keterbatasan modal, informasi, maupun akses.

Lebih jauh, transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan pertanian, dari sistem berbasis pengalaman komunitas menuju sistem berbasis teknologi, sains, dan institusi modern. Perusahaan tidak hanya memperkenalkan komoditas baru, tetapi juga membentuk cara berpikir baru dalam bertani lebih teknis, terukur, dan terintegrasi dengan logika pasar. Modernisasi ini memperkuat proses komersialisasi pertanian dan mempercepat integrasi masyarakat ke dalam sistem produksi kapitalistik. Dengan demikian, perubahan dalam pola penggunaan input usahatani menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tinting Boyok tengah bergerak dari pertanian tradisional menuju pertanian modern yang lebih intensif, efisien, dan terstandarisasi. Namun, proses ini juga menghadirkan tantangan dalam hal pemerataan akses dan risiko ketimpangan, yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka pembangunan pertanian berkelanjutan.

d. Perubahan Kelembagaan Usahatani

Kehadiran PT Tinting Boyok Sawit Makmur (PT TBSM) membawa perubahan signifikan terhadap bentuk dan dinamika kelembagaan usahatani di Desa Tinting Boyok. Secara umum, kelembagaan ini berkembang dalam dua bentuk, yakni kelembagaan formal dan nonformal, yang keduanya menunjukkan respon sosial yang berbeda terhadap masuknya sistem perkebunan kelapa sawit berbasis industri.

Kelembagaan formal mulai berkembang secara terstruktur sejak perusahaan mendorong pembentukan koperasi kemitraan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial sekaligus implementasi regulasi, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perkebunan dan Perkoperasian. Salah satu bentuknya adalah Koperasi Produsen Tintin Boyok Lestari yang berfungsi sebagai wadah pengorganisasian petani sawit swadaya. Melalui koperasi, petani memperoleh akses pada harga jual tandan buah segar (TBS) yang lebih adil, sarana produksi, fasilitas transportasi, serta informasi teknis pertanian yang sebelumnya sulit dijangkau secara individu.

Di sisi lain, kelembagaan nonformal yang telah lama tumbuh di masyarakat tetap eksis, terutama dalam sistem pertanian padi. Sistem kerja tradisional seperti *royong* dan *bejalai ari* tetap dijalankan dengan semangat gotong royong yang kuat. Dalam praktik ini, masyarakat bekerja bersama dalam pengolahan lahan dan panen padi tanpa imbalan material, melainkan dengan prinsip timbal balik sosial dan kepercayaan. Nilai-nilai lokal seperti solidaritas, kebersamaan, tanggung jawab moral, dan ketaatan pada adat menjadi fondasi utama dari sistem ini. Bahkan, tradisi budaya seperti ritual *Ngisi Tukan* dan *Gawai Dayak* terus dipertahankan sebagai ekspresi spiritual, identitas etnik, dan perayaan hasil panen yang memperkuat kohesi sosial di tengah perubahan zaman.

Salah satu perubahan penting dalam kelembagaan nonformal usahatani di Desa Tinting Boyok adalah berkurangnya jumlah anggota kelompok royong dibandingkan dengan masa lalu. Pada masa sebelumnya, sistem kerja royong atau gotong royong merupakan praktik umum yang sangat diandalkan dalam kegiatan pertanian tradisional, terutama dalam pengolahan lahan padi. Kelompok royong dibentuk secara sukarela berdasarkan rasa solidaritas, kedekatan sosial, dan kebutuhan kolektif untuk menyelesaikan pekerjaan berat secara bergantian. Sistem ini tidak hanya efektif secara kerja, tetapi juga mengikat masyarakat dalam norma sosial yang kuat, seperti saling membantu dan menjaga keharmonisan komunitas. Namun, saat ini, jumlah anggota dalam

kelompok royong mengalami penurunan yang nyata. Berkurangnya jumlah ini disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, tidak adanya regenerasi tenaga kerja dalam keluarga petani. Banyak orang tua yang dahulu aktif dalam kelompok royong kini telah berusia lanjut dan tidak lagi produktif. Sementara itu, anak-anak muda atau generasi penerus tidak melanjutkan peran orang tua mereka dalam kegiatan royong. Hal ini terjadi karena generasi muda cenderung memilih untuk bekerja di sektor lain, terutama sebagai buruh atau karyawan di perusahaan kelapa sawit, yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi dan tidak membutuhkan ikatan komunal sebagaimana sistem royong. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi nilai dari kerja kolektif berbasis sosial ke arah kerja individual berbasis ekonomi. *Kedua*, semakin terbatasnya pemilikan lahan pertanian, khususnya lahan untuk tanaman padi, juga menjadi faktor penting dalam menurunnya praktik royong. Banyak petani yang tidak lagi memiliki cukup lahan untuk dikelola secara kolektif, atau bahkan kehilangan akses terhadap lahan karena dialihfungsikan untuk kebun sawit. Dalam situasi ini, kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah besar pun menurun, sehingga sistem royong tidak lagi relevan atau dibutuhkan sebagaimana sebelumnya. Petani yang hanya memiliki lahan sempit lebih memilih mengerjakannya sendiri atau dengan bantuan anggota keluarga, bukan melalui sistem kerja kelompok.

Penurunan partisipasi dalam royong ini menunjukkan perubahan struktural dalam kelembagaan nonformal masyarakat. Nilai-nilai lokal seperti kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu mulai memudar, tergantikan oleh nilai-nilai efisiensi, pragmatisme, dan orientasi pasar yang menyertai modernisasi sektor pertanian, terutama setelah masuknya perusahaan besar. Meskipun secara formal kelembagaan pertanian terus berkembang, secara sosial budaya masyarakat menghadapi tantangan dalam mempertahankan warisan nilai kolektif. Ini mencerminkan bahwa modernisasi pertanian tidak hanya membawa perubahan pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga berdampak pada nilai-nilai sosial yang melekat dalam kehidupan desa. Masyarakat Desa Tinting Boyok kini berada pada titik transisi, di mana sebagian nilai lokal masih dipertahankan, namun sebagian lainnya mulai memudar akibat perubahan struktur ekonomi dan demografi desa. Hal ini sejalan dengan temuan studi di Ngasinan yang menunjukkan bahwa modernisasi tidak menghapus gotong royong, melainkan mentransformasikannya agar selaras dengan kebutuhan rasional ekonomi masyarakat pedesaan kontemporer (Wulandari & Trinugraha, 2025).

Dengan demikian, perubahan kelembagaan usahatani di Desa Tinting Boyok merupakan refleksi dari perubahan sosial yang kompleks. Kelembagaan formal berkembang dalam konteks ekonomi komersial modern, sementara kelembagaan nonformal menjadi ruang pelestarian nilai, identitas, dan solidaritas komunitas. Keduanya bergerak berdampingan sebagai wujud dualisme struktural masyarakat desa yang sedang bertransformasi, dengan kebutuhan untuk tetap adaptif tanpa kehilangan jati diri kultural yang telah diwariskan turun-temurun.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan kelapa sawit PT Tinting Boyok Sawit Makmur (TBSM) telah menjadi faktor transformasional dalam mengubah struktur sosial masyarakat Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu. Perubahan ini tidak hanya terlihat pada pergeseran jenis pekerjaan masyarakat dari sektor pertanian tradisional ke pekerjaan formal di sektor perkebunan, tetapi juga menyentuh aspek-aspek penting lainnya seperti pemilikan dan pemanfaatan lahan, penggunaan input usahatani

modern, serta pergeseran nilai-nilai sosial dan kelembagaan lokal. Adopsi teknologi pertanian dan peningkatan penggunaan pupuk, pestisida, serta bibit unggul menunjukkan bahwa masyarakat mulai terbuka terhadap modernisasi pertanian. Namun demikian, akses terhadap inovasi tersebut masih belum merata, cenderung didominasi oleh petani dengan kepemilikan lahan yang lebih luas.

Dari sisi sosial, meskipun perusahaan turut mempercepat proses modernisasi melalui penyuluhan dan pelatihan, perubahan ini juga berdampak pada melemahnya relasi sosial yang selama ini dibangun atas dasar gotong royong dan kebersamaan. Kelembagaan nonformal tradisional seperti sistem *bejalai ari* dan *royong* mulai terpinggirkan oleh sistem kerja berbasis upah dan penggunaan alat-alat mekanis. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dari kolektivitas menuju individualisme, yang tidak hanya memengaruhi pola kerja, tetapi juga menurunkan intensitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan adat istiadat. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian dan peran aktif dari berbagai pihak agar proses perubahan ini tetap berada dalam jalur pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., Jin, J., Khan, A., Hussain, J., & Sophia, T. T. (2021). A Study of the Adoption of Technology in Agriculture: Evidence from the Indonesian Paddy-Rice Farmer. *Cutting-Edge Research in Agricultural Sciences Vol. 12, December*, 105–124. <https://doi.org/10.9734/bpi/cras/v12/2487f>
- Akzar, R., Umberger, W., & Peralta, A. (2023). Understanding Heterogeneity in Technology Adoption Among Indonesian Smallholder Dairy Farmers. *Agribusiness*, 39(2), 347–370. <https://doi.org/10.1002/agr.21782>
- Anseeuw, W., & Baldinelli, G. M. (2020). *Uneven Ground. Land Inequality at the Heart of Unequal Societies*. <https://www.landcoalition.org/en/uneven-ground/report-and-papers/>
- Ardhi, M. G., Nadja, R. A., Amiruddin, A., Demmallino, E. B., & Fudjaja, L. (2023). Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan pada PT. Surya Sawit Sejahtera. *Phinisi Integration Review*, 5(3), 818–823. <https://ojs.unm.ac.id/pir/article/view/54048/23984>
- Arifin, Z., Mulyana, A., & Hidayat, R. (2020). Potensi dan Tantangan Pengembangan Hortikultura di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Agribisnis Modern*, 8(2), 115–130.
- Baka, W. K., Rianse, I. S., & la Zulfikar, Z. (2024). Palm Oil Business Partnership Sustainability through the Role of Social Capital and Local Wisdom: Evidence from Palm Oil Plantations in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 16(17). <https://doi.org/10.3390/su16177541>
- Faqih, A., & Khairussalam. (2024). Perubahan Sosial Masyarakat Akibat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Barambai Karya Tani Kabupaten Barito Kuala. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 3(3), 319–328. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/h-js.v3i3.229>
- Grasse, D. (2022). Oil Crops and Social Conflict: Evidence From Indonesia. *Journal of Conflict Resolution*, 66(7–8), 1422–1448. <https://doi.org/10.1177/00220027221084826>
- Hidayah, U. N., Widuri, N., & Maryam, S. (2020). Dampak Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus PT. Prima Mitrajaya Mandiri di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara). *Journal of Agribusiness and Agricultural Communication*, 3(2), 63–70. <https://doi.org/10.35941/jakp.3.2.2020.3314.63-70>
- Lauermann, J., & Mallak, K. (2023). Elite capture and urban geography: Analyzing

- geographies of privilege. *Progress in Human Geography*, 47(5), 645–663. <https://doi.org/10.1177/03091325231186810>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. CA: SAGE Publications.
- Musyayyadah, H., Sucipto, S., & Siregar, E. S. (2023). Dampak Keberadaan PT. Lontar Papyrus Pulp And Paper Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(3), 100–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/digital.v2i2.1295>
- Nurhadi, E., Sari, N., & Lestari, P. (2019). Dominasi Lahan Kelapa Sawit dan Implikasinya terhadap Ketersediaan Lahan Hortikultura. *Jurnal Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 6(3), 89–102.
- Perangin-angin, A. G. (2024). Kompleksitas Pertanian Indonesia: Membangun Kekuatan Politik Agraria Dan Kebijakan Teknologi Bidang Pertanian. *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik*, 8(1), 17–31. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/21888>
- Rismarini, Nurjannah, H., Junainah, Feriadi, & Rahayu, W. N. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Karet di Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Pertanian*, 19(2), 45–48. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/klorofil/article/viewFile/9363/4397>
- Roanuddin, M. (2016). Dampak Sosial dan Ekonomi Aktivitas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Gawi Makmur Kalimantan di Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 12–25. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/04/MuadRoanuddin\(04-05-16-02-12-42\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/04/MuadRoanuddin(04-05-16-02-12-42).pdf)
- Sari, D. P. (2023). Modernisasi di Desa Raya: Studi tentang Pergeseran Sosial dalam Komunitas Agraris. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 18(3), 100–112.
- Sari, N., & Putra, D. (2023). Strategi Adaptasi Petani dalam Transformasi Agraria: Perspektif Dinamika Sosial-Ekonomi di Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pertanian*, 18(1), 45–62.
- Siradjuddin, I. (2015). Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Agroteknologi*, 5(2), 7. <https://doi.org/10.24014/ja.v5i2.1349>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Edisi 2, C). Alfabeta.
- Sunartomo, A. F. (2015). Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Jember. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 8(2), 47–58. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP/article/view/3750/2938>
- The Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia. (2021). *Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2020). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, 35(1), 37–59.
- Wulandari, D. R., & Trinugraha, Y. H. (2025). From Collective Solidarity to Rational Participation: Transforming the Royongan Omah Tradition in Ngasinan Village, Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSai)*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.22373/jsai.v6i1.6660>
- Yuliani, N. (2019). *Statistika untuk Penelitian Pendidikan*. Deepublish.